



Transformasi Ruang Domestik Akibat *Overtourism* Non-Material di Desa Adat Penglipuran Bali

Ashri Ramadhan^{1*}, Muhammad Zikri²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

E-mail: ashriramadhan6@gmail.com², mhdzikriofficial@gmail.com²

Diajukan 08-07-2026	Direvisi 27-07-2026	Diterima 28-07-2026
------------------------	------------------------	------------------------

ABSTRACT

The global reputation of Penglipuran Traditional Village as a sustainable tourism destination is commonly attributed to communal adherence to the Tri Hita Karana philosophy and the preservation of vernacular architecture. However, the intensification of cultural commodification has produced a phenomenon this study terms non-material overtourism, which erodes the boundaries of residents' private domestic space. This study critically examines the functional transformation and socio-cultural negotiation that occur within domestic space as a consequence of mass-tourism pressure. Using a critical ethnography approach combined with Lefebvre's spatial-triad analysis, data were collected from a total of 18 informants 12 women engaged in home-based tourism enterprises, 3 members of the customary village authority (prajuru desa), and 3 heads of household who modified their domestic space through in-depth interviews, participatory observation, and analysis of customary legal documents (BUPDA). The findings indicate that domestic spaces, particularly the paon (traditional kitchen) and the teba (rear yard), have been transformed into hybrid commercial zones that generate psychological fatigue and a double burden for women. Confronted with the rigidity of customary spatial regulation, residents perform micro-political resistance through concealed spatial modification to preserve their privacy and autonomy. Compared to prior studies that stop at describing institutional compliance, this study's principal contribution is twofold: theoretically, it establishes non-material overtourism as a distinct analytical category that extends overtourism literature beyond ecological carrying capacity and macroeconomic indicators into the psychological and spatial dimensions of the household; methodologically, it repositions grassroots micro-political agency particularly women's as the primary unit of analysis, rather than treating customary institutions as a monolithic, compliant whole. The study implies the need to reorient community-tourism policy so that it addresses not only macroeconomic aggregates and physical aesthetics, but also psychological protection and gender-equitable relations within the domestic sphere.

Keywords: non-material overtourism; domestic space; spatial agency; Community-Based Tourism; Lefebvre's spatial triad; gender.

ABSTRAK

Keberhasilan Desa Adat Penglipuran sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan global umumnya dinarasikan melalui kepatuhan komunal terhadap filosofi Tri Hita Karana dan pelestarian arsitektur vernakular. Namun, intensifikasi komodifikasi budaya memunculkan fenomena yang penelitian ini istilahkan sebagai overtourism non-material, yaitu kondisi yang mengikis batas ruang privat penduduk. Penelitian ini mengkaji secara kritis transformasi fungsional dan negosiasi sosiokultural yang terjadi di ruang domestik akibat tekanan pariwisata massal. Dengan pendekatan etnografi kritis yang dipadukan dengan analisis triad spasial Lefebvre, data dikumpulkan dari total 18 informan 12 perempuan pelaku usaha pariwisata berbasis rumah tangga, 3 anggota prajuru desa, dan 3 kepala keluarga yang melakukan modifikasi ruang melalui wawancara mendalam, observasi partisipatoris, dan analisis dokumen hukum adat (BUPDA). Temuan menunjukkan bahwa ruang domestik, khususnya paon (dapur tradisional) dan teba (halaman belakang), telah bertransformasi menjadi zona komersial hibrida yang memicu kelelahan psikologis dan beban ganda bagi perempuan. Menghadapi rigiditas regulasi tata ruang adat, warga melakukan resistensi mikropolitik melalui modifikasi spasial terselubung untuk mempertahankan privasi dan otonomi mereka. Dibandingkan kajian terdahulu yang berhenti pada deskripsi kepatuhan institusional, kebaruan utama penelitian ini bersifat ganda: secara teoretis, penelitian ini menegaskan overtourism non-material sebagai kategori analitis baru yang memperluas literatur



overtourism melampaui daya dukung ekologis dan indikator makroekonomi ke dimensi psikologis dan spasial rumah tangga, secara metodologis, penelitian ini menempatkan agensi mikropolitik akar rumput khususnya perempuan sebagai unit analisis utama, alih-alih memperlakukan kelembagaan adat sebagai entitas monolitik yang patuh. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya reorientasi kebijakan desa wisata agar tidak hanya berfokus pada agregat makroekonomi dan estetika fisik, tetapi juga sensitif terhadap perlindungan psikologis dan kesetaraan relasi gender di ranah domestik.

Kata Kunci: overtourism non-material; ruang domestik; agensi spasial; Pariwisata Berbasis Masyarakat; triad spasial Lefebvre; gender.

PENDAHULUAN

Pembangunan kepariwisataan di Bali secara konsisten merepresentasikan negosiasi antara modernisasi ekonomi dan ketahanan struktur budaya tradisional (Meitasari et al., 2026). Dalam diskursus pariwisata berkelanjutan, Desa Adat Penglipuran diakui secara global sebagai model ideal Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism) karena berhasil memadukan pelestarian ekologis dengan kesejahteraan ekonomi melalui penerapan filosofi keseimbangan Tri Hita Karana (Pramono, 2025). Sebagai destinasi yang berulang kali meraih predikat desa terbersih di dunia dan masuk daftar Seratus Destinasi Berkelanjutan Global, Penglipuran menawarkan integrasi antara pelestarian budaya Bali Mula, konservasi ekologis, dan implementasi pariwisata berbasis masyarakat (Wijaya et al., 2023). Struktur kelembagaan lokal yang kokoh, termanifestasi melalui awig-awig (konstitusi adat) dan pararem (regulasi turunan), telah membentengi desa ini dari komersialisasi aset oleh pihak eksternal. Meskipun demikian, lonjakan popularitas desa ini turut mendorong perubahan struktural yang bukan sekadar pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor agraris ke sektor jasa wisata, melainkan juga rekonfigurasi tatanan ruang domestik dan nilai kohesi sosial yang selama ini dijaga oleh regulasi adat.

Tinjauan atas publikasi akademik lima tahun terakhir (2021-2026) memperlihatkan literatur yang saling melengkapi namun juga menyisakan kesenjangan penting. pertama berfokus pada konservasi ekologis dan arsitektur tradisional berbasis kosmologi, dengan menempatkan awig-awig sebagai instrumen pelestarian hutan bambu dan tata ruang Tri Mandala (Paramita, 2025). Hal ini umumnya bersandar pada Teori Pembangunan Berkelanjutan dan Ekologi Budaya, yang mengasumsikan kebudayaan berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang menjamin kelestarian ekosistem (Septriani et al., 2024). Kelemahan mendasar klaster ini adalah kecenderungan meromantisasi kearifan lokal sebagai entitas statis dan mengabaikan realitas bahwa ruang terus-menerus diproduksi ulang melalui interaksi sosial yang penuh kompromi, termasuk modifikasi tersembunyi pada zona teba yang semula berfungsi sebagai area utilitas. Kedua menyoroti pembangunan ekonomi pariwisata dan dilema komodifikasi budaya, mencakup strategi pemasaran digital pascapandemi, kelembagaan Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), serta pergeseran mata pencaharian dari sektor agraris ke jasa wisata (Marcelliantika et al., 2025). Kajian pada bagian ini umumnya bertumpu pada Teori Pariwisata Berbasis Masyarakat, Tata Kelola Kolaboratif, dan Komodifikasi Budaya, tetapi terlalu berfokus pada agregat makroekonomi desa sehingga luput menganalisis tekanan psikologis di tingkat rumah tangga. Ketiga mengkaji kelembagaan adat, kohesi sosial, dan akuntabilitas transenden, termasuk penegakan sanksi adat seperti Karang Memadu bagi pelanggar ketentuan monogami (Sriyani & Pinasti, 2022). hal ini bersandar pada Fungsionalisme Struktural dan Modal Sosial, namun cenderung mereduksi masyarakat Penglipuran menjadi entitas

monolitik yang patuh, sehingga mengabaikan agensi individu khususnya perempuan yang berperan ganda sebagai penjaga ruang domestik sekaligus penggerak ekonomi wisata.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua kesenjangan (research gap) yang saling terkait. Pertama, literatur arus utama merayakan kelestarian tata ruang makro Penglipuran namun mengalami defisit teoretis dalam menjelaskan transformasi fungsional pada tata ruang mikro di dalam pekarangan rumah tangga, khususnya bagaimana intrusi wisatawan menembus batas antara ruang publik, sakral, dan privat suatu kondisi yang oleh penelitian ini disebut sebagai *overtourism non-material*, berbeda dari *overtourism* fisik yang lazim dibahas dalam kajian daya dukung lingkungan. Kedua, literatur kelembagaan adat cenderung didominasi sudut pandang elitis (prajuru desa) sehingga menyisakan ruang kosong pada representasi agensi aktor akar rumput, terutama perempuan, dalam menavigasi ketegangan antara kewajiban spiritual dan desakan ekonomi pariwisata.

Berbeda dari kajian terdahulu yang umumnya berhenti pada deskripsi kepatuhan institusional, kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan agensi mikropolitik warga khususnya perempuan sebagai unit analisis utama untuk membongkar ketegangan antara *Conceived Space* yang dirumuskan otoritas adat dan *Lived Space* yang dihayati warga sehari-hari, dengan berpijak pada triad spasial Henri Lefebvre. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis transformasi fungsional ruang domestik dan mekanisme negosiasi sosiokultural yang dikerahkan aktor lokal dalam menghadapi tekanan *overtourism non-material* dan hegemoni regulasi adat. Dua pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana komodifikasi pariwisata berbasis rumah tangga memicu rekonfigurasi fungsi, pergeseran makna kosmologis, dan pembubaran batas sosiologis ruang domestik, khususnya zona privat pekarangan dan paon, dan (2) bagaimana strategi agensi mikropolitik dan negosiasi kultural yang dikerahkan aktor lokal, khususnya perempuan, untuk mempertahankan otonomi dan privasi ruang hidup mereka di tengah hegemoni regulasi tata ruang adat.

METODE

Secara umum metode penelitian adalah cara atau prosedur ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Azam & Ramadhan, 2026). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi kritis (critical ethnography) yang dipadukan dengan analisis spasial kritis. Berbeda dari etnografi konvensional yang bersifat deskriptif-netral, etnografi kritis diarahkan untuk menyingkap ketegangan relasi kuasa, membongkar dominasi struktural otoritas adat, dan menarasikan taktik resistensi spasial subjek yang termarginalkan. Kerangka analitis utama yang digunakan adalah triad produksi ruang (spatial triad) oleh Firmansyah, yang membedakan tiga dimensi ruang yang beroperasi secara simultan: (a) *Conceived Space* atau ruang yang dikonsepkan, yaitu representasi formal keruangan yang diregulasi otoritas desa melalui awig-awig, pararem, dan konsep Tri Mandala, (b) *Perceived Space* atau ruang yang dipersepsikan, yaitu praktik spasial harian yang teramati, termasuk pola sirkulasi wisatawan yang melintasi angkul-angkul menuju ruang domestik, dan (c) *Lived Space* atau ruang yang dihayati, yaitu dimensi afektif dan psikologis yang dirasakan warga saat privasi mereka terekspos (Firmansyah, 2024).

Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling yang dikembangkan dengan snowball sampling untuk menjangkau informan yang relevan secara pasti. Secara umum Subjek penelitian merupakan individu, kelompok, atau lembaga yang dijadikan sumber data atau sasaran dalam sebuah penelitian (A'yun et al., 2025). Penelitian ini

melibatkan total 18 informan yang terbagi ke dalam tiga kelompok untuk menjamin triangulasi perspektif. Kelompok pertama berjumlah 12 orang, yaitu perempuan aktor agensi mikro pengelola ruang domestik yang aktif dalam usaha pariwisata berbasis rumah tangga (pengerajin bambu, penjual kuliner di area paon, dan pengelola homestay) yang tinggal berdekatan dengan koridor sirkulasi utama wisata (rurung gede). Kelompok kedua berjumlah 3 orang, yaitu otoritas adat yang mencakup Bendesa dan pengurus BUPDA, untuk merekonstruksi *Conceived Space* di balik perumusan *pararem*. Kelompok ketiga berjumlah 3 orang, yaitu kepala keluarga yang diketahui melakukan modifikasi ruang pada zona teba, sebagai representasi jejak fisik negosiasi pragmatis antara kepentingan komersial dan aturan adat. Penetapan jumlah ini mengikuti prinsip kejenuhan data (*data saturation*) dalam etnografi kritis, yaitu dihentikannya penambahan informan ketika wawancara lanjutan tidak lagi memunculkan kategori atau tema baru pada masing-masing kelompok.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh narasi *Lived Space* warga, dengan panduan pertanyaan berjenjang mulai dari riwayat perubahan fungsi ruang, kelelahan psikologis akibat *staged authenticity*, hingga beban ganda perempuan dan risiko sanksi sosial. Kedua, observasi partisipatoris spasial-etnografis dilakukan sepanjang siklus diurnal rumah tangga (pagi hingga senja) untuk memetakan densitas kunjungan wisatawan serta mendokumentasikan batas tak kasat mata (*invisible boundaries*), seperti sekat bambu semu dan tirai, yang dipasang warga sebagai zona pelarian (*refuge*). Ketiga, analisis dokumen kritis dilakukan terhadap salinan *awig-awig*, surat ketetapan *pararem*, dan klausul Perjanjian Kerja Sama BUPDA untuk merekonstruksi doktrin tata ruang kosmologis yang diregulasi otoritas adat.

Data dianalisis menggunakan model interaktif (*Interactive Model of Qualitative Data Analysis*) yang dipadukan dengan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*). Prosedur analisis dilakukan melalui empat tahap: (1) kondensasi dan pengkodean data berdasarkan matriks triad spasial Lefebvre, memilah ujaran yang merepresentasikan wacana elitis (*Conceived Space*) dan ujaran subaltern (*Lived Space*), (2) pemetaan kontradiksi antara narasi normatif dokumen hukum adat dan temuan empiris di lapangan, (3) visualisasi pola taktik spasial perempuan pekerja domestik dalam bentuk diagram konseptual, serta (4) verifikasi kesimpulan melalui triangulasi sumber, yaitu menyilangkan bukti observasi arsitektural, narasi informan perempuan, dan justifikasi prajuru adat. Prosedur ini dirancang secara eksplisit dan berjenjang agar dapat direplikasi oleh peneliti lain pada konteks desa wisata adat serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dihimpun melalui observasi dan wawancara mendalam menyingkap tiga temuan utama. Temuan pertama adalah pergeseran fungsi ruang paon (dapur tradisional). Perempuan pengelola homestay melaporkan bahwa paon kini berfungsi ganda sebagai area produksi kriya, titik penjualan komersial, sekaligus ruang interaksi dengan wisatawan. Peningkatan intensitas kunjungan wisata dari pagi hingga sore memaksa penghuni untuk terus-menerus mempraktikkan keramahtamahan, yang berdampak pada kelelahan psikologis dan hilangnya batas ruang privat keluarga. Sebagai bentuk adaptasi, penghuni memasang kerai bambu non-permanen untuk menciptakan demarkasi visual yang membatasi akses pandangan wisatawan.

Temuan kedua berkaitan dengan modifikasi fisik yang dilakukan secara terselubung oleh warga. Terlepas dari aturan ketat tata ruang makro, terdapat praktik deviasi spasial

di zona teba (nista mandala), yang secara historis difungsikan untuk utilitas domestik atau pemeliharaan ternak. Area ini secara empiris telah dicor atau diubah menjadi struktur semi-permanen untuk menyimpan stok cendera mata dan mendirikan warung kopi kecil, sebagai strategi bertahan hidup di tengah tuntutan ekonomi wisata.

Temuan ketiga menyoroti perspektif otoritas adat. Prajuru desa menyadari adanya praktik modifikasi pragmatis oleh warga di area belakang rumah, namun menerapkan toleransi diam-diam (*tacit tolerance*) selama modifikasi tersebut tidak mengubah fasad utama (*angkul-angkul* dan *sakenem*) serta tidak melanggar tata ruang jalan utama (*rurung gede*). Otoritas adat kini lebih memfokuskan instrumen hukum melalui BUPDA untuk mencegah privatisasi aset oleh pihak luar dan mempertahankan perputaran ekonomi di dalam komunitas, dengan tetap mengandalkan filosofi keharmonisan dan sanksi Karang Memadu sebagai instrumen kontrol moral.

Temuan lapangan ini mengonfirmasi bahwa Desa Penglipuran tengah mengalami disrupsi sosiologis yang penelitian ini konseptualisasikan sebagai *overtourism non-material*. Berbeda dari degradasi lingkungan fisik yang dibahas literatur konservasi ekologis (Meitasari et al., 2026), *overtourism non-material* bermanifestasi melalui invasi ke ruang privat dan sakral warga, yang mengaburkan batas antara panggung komersial dan area reproduksi sosial keluarga. Transformasi paon dari zona utilitas marginal menjadi episentrum ekonomi rumah tangga menunjukkan terjadinya rekonfigurasi nilai kosmologis keruangan, sejalan dengan argumen bahwa ruang senantiasa diproduksi ulang melalui praktik sosial dan bukan sekadar wadah pasif (Sumarwoto, 2025).

Keunggulan temuan ini dibandingkan literatur komodifikasi budaya terdahulu bersifat spesifik, bukan sekadar perluasan cakupan. Literatur sebelumnya (mis. Marcelliantika et al., 2025) mengukur dampak komodifikasi pada level agregat ekonomi desa pendapatan, kelembagaan BUPDA, strategi pemasaran sehingga tekanan yang dialami rumah tangga secara individual tidak tertangkap oleh instrumen makro tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa unit analisis rumah tangga menangkap dua hal yang luput dari level makro: (a) rekonfigurasi fungsi ruang yang bersifat harian dan berulang, sehingga baru terlihat lewat observasi diurnal, bukan survei satu waktu, dan (b) taktik penyesuaian informal (*kerai bambu*, *sekat semu*) yang tidak tercatat dalam dokumen hukum adat maupun statistik ekonomi desa, namun menjadi mekanisme utama warga menegosiasikan tekanan tersebut. Dengan kata lain, kebaruan penelitian ini bukan hanya menambah topik baru pada daftar dampak pariwisata, melainkan menawarkan skala analisis (rumah tangga, harian) yang secara metodologis tidak terjangkau oleh instrumen makroekonomi yang selama ini dipakai.

Dari perspektif triad spasial Lefebvre, temuan ini memperlihatkan ketegangan dialektis antara *Conceived Space* ruang yang dikonsepsikan elite adat melalui BUPDA dan *pararem* dengan *Lived Space*, yaitu ruang yang dihayati warga di tingkat mikro (Permana, 2022). Berbeda dari literatur fungsionalisme struktural yang menggambarkan kepatuhan warga sebagai kondisi monolitik (Tambak, 2026), data empiris penelitian ini justru menyingkap agensi mikropolitik: modifikasi diam-diam pada area teba merupakan taktik rasional warga untuk menegosiasikan aturan adat yang rigid dengan tuntutan keberlangsungan ekonomi pariwisata. Toleransi diam-diam yang diberikan otoritas adat turut menunjukkan bahwa *Conceived Space* bukan struktur yang sepenuhnya tertutup, melainkan senantiasa dinegosiasikan ulang dalam praktik sehari-hari. Di sinilah letak keunggulan metodologis penelitian ini: dengan menjadikan taktik warga akar rumput bukan regulasi normatif prajuru sebagai unit analisis utama, penelitian ini mampu mendokumentasikan proses negosiasi yang oleh kajian berbasis dokumen hukum adat

(yang mengandalkan awig-awig dan pararem sebagai sumber data utama) secara struktural tidak dapat terlihat, karena proses tersebut sengaja disembunyikan dari pencatatan formal

Penelitian ini juga mengisi kesenjangan literatur terkait dimensi gender dalam pariwisata berbasis masyarakat, yang selama ini lebih banyak membahas pemberdayaan ekonomi perempuan tanpa mengelaborasi beban psikologisnya. Perempuan di Penglipuran menanggung beban ganda (*double burden*) yang masif: mereka dikonstruksikan sebagai penjaga tradisi spiritual, namun sekaligus dituntut menjadi penggerak utama ekonomi pariwisata di ruang domestik. Pemasangan partisi non-permanen seperti kerai bambu bukan sekadar penyesuaian fisik, melainkan bentuk resistensi spasial harian untuk melindungi otonomi psikologis mereka dari eksploitasi visual yang berkelanjutan, atau apa yang dalam literatur pariwisata disebut sebagai *staged authenticity* (Aryanta, 2026). Keunggulan penelitian ini pada dimensi gender adalah menautkan dua hal yang selama ini dibahas terpisah dalam literatur CBT pemberdayaan ekonomi perempuan dan beban psikologis rumah tangga ke dalam satu kerangka spasial yang sama, sehingga beban ganda tidak lagi dibaca sebagai isu kesejahteraan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari rekonfigurasi ruang akibat overtourism non-material. Dengan demikian, temuan ini menegaskan kebaruan penelitian ini dibandingkan kajian terdahulu: alih-alih memandang komunitas adat sebagai entitas yang patuh secara pasif, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sosial Penglipuran justru ditopang oleh negosiasi mikropolitik yang terus-menerus antara warga, khususnya perempuan, dan otoritas adat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Komodifikasi pariwisata di Desa Adat Penglipuran memicu dekonstruksi fungsional pada ruang domestik, mengubah *paon* dan area pekarangan privat menjadi zona hibrida yang mengaburkan batas kosmologis dan sosiologis antara ruang sakral, privat, dan publik. Fenomena ini penelitian ini konseptualisasikan sebagai overtourism non-material, yang melengkapi kajian overtourism fisik dengan menunjukkan bahwa tekanan pariwisata massal juga menginvasi dimensi psikologis dan spasial yang lebih intim. Dalam menghadapi hegemoni regulasi tata ruang adat dan tekanan eksploitatif overtourism non-material, masyarakat lokal, khususnya kelompok perempuan, tidak bertindak pasif. Mereka mengerahkan agensi mikropolitik melalui taktik deviasi spasial terselubung di area marjinal (*teba*) dan penciptaan batas visual tak kasat mata untuk menegosiasikan keberlangsungan ekonomi rumah tangga tanpa memicu konflik terbuka dengan otoritas adat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis yang ditujukan secara spesifik kepada para pemangku kepentingan terkait. Langkah awal yang perlu diambil oleh Prajuru Desa Adat Penglipuran, termasuk Bendesa Adat dan jajaran pengurus Badan Usaha Pemilik Desa Adat (BUPDA), melalui perumusan *pararem* tambahan yang mengakomodasi perlindungan ruang privat rumah tangga. Kebijakan ini dapat diwujudkan dengan menetapkan zona penyangga guna membatasi akses wisatawan ke area domestik seperti *paon*, sehingga toleransi implisit yang selama ini bersifat informal dapat dilembagakan menjadi regulasi tertulis yang melindungi warga tanpa mengorbankan fleksibilitas ekonomi. Bersamaan dengan itu, pengurus BUPDA selaku pengelola ekonomi desa wisata disarankan untuk mengembangkan program dukungan psikologis, seperti forum berbagi berkala bagi perempuan pelaku usaha rumah tangga, serta mengampanyekan skema pembagian kerja domestik yang lebih adil demi memitigasi beban ganda yang mereka tanggung sebagai penjaga tradisi sekaligus penggerak ekonomi.

Pada tataran makro, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli serta Dinas Pariwisata Provinsi Bali memegang peran penting untuk mengintegrasikan indikator kesejahteraan psikologis dan kesetaraan gender rumah tangga ke dalam instrumen evaluasi desa wisata berkelanjutan. Langkah integrasi ini menjadi urgensi karena instrumen evaluasi sejauh ini masih didominasi oleh indikator fisik-ekologis dan makroekonomi, sehingga pembaruan tersebut dapat menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan insentif maupun pendampingan bagi desa-desa adat serupa di Bali. Akhirnya, bagi agenda akademis masa depan, peneliti lanjutan diarahkan untuk menguji generalisasi konsep *overtourism* non-material pada desa wisata adat lainnya, baik di dalam maupun di luar Bali. Upaya tersebut sebaiknya dibarengi dengan pengembangan instrumen pengukuran kuantitatif, seperti skala kelelahan psikologis rumah tangga wisata, guna memperkaya dan melengkapi temuan kualitatif yang telah dihasilkan dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan di Desa Adat Penglipuran, termasuk prajuru desa, pengurus BUPDA, dan warga yang telah bersedia berbagi pengalaman dalam penelitian ini, atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- A'yun, S. Q., Habsy, B. A., & Nursalim, M. (2025). Model-model penelitian kualitatif: Literature review. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2), 341–354.
- Azam, M., & Ramadhan, A. (2026). Krisis Identitas Masyarakat Gili Trawangan Lombok Utara dalam Pusaran Homogenisasi Destinasi Wisata. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 11(2), 430–455.
- Firmansyah, W. (2024). Triad Conceptuals Henri Lefebvre dalam Produksi Ruang di Alun-Alun Malingping. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 6(1), 1–12.
- Marcelliantika, A., Rahmawati, A. P., & Sandikusumah, A. (2025). Komodifikasi Budaya dan Dampaknya Terhadap Pariwisata. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 11(2), 179–200.
- Paramita, I. B. G. (2025). Integrasi kearifan lokal Tri Hita Karana dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan: Studi kasus Desa Penglipuran, Bali. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 6(1), 63–74.
- Sriyani, N. L., & Pinasti, V. I. S. (2022). Sanksi Adat Karang Memadu sebagai Upaya Antisipasi Perkawinan Poligami di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11(2), 32–74.
- Sumarwoto, I. (2025). Reproduction of Space and Marginalized Heritage: The Rumah Limas as an Architectural Critique of Urban Transformation in Palembang. *Lakar: Jurnal Arsitektur*, 8(2), 230–245.
- Wijaya, K. V. K. A., Sari, K. A. L. H., & Ujianto, B. T. (2023). Strategi keberlanjutan pada desa wisata adat Penglipuran, Bali. *Prosiding SEMSINA*, 4(01), 67–74.

Buku:

- Aryanta, I. W. A. (2026). *Konflik Hukum Adat & Negara: Pergulatan Hukum, Budaya, dan Wisata Pantai Melasti*. PT. Dharma Pustaka Utama.
- Meitasari, D., Rayesa, N. F., Prasetyaningrum, D. I., Dewi, H. E., Laili, F., & Mutisari, R.



-
- (2026). *Merancang Masa Depan Desa Wisata: Pariwisata Berbasis Komunitas dan Inovasi Sosial di Pedesaan Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Pramono, R. (2025). *Desa Wisata: Membangun Keberlanjutan dan Pemberdayaan Komunitas*. Penerbit NEM.
- Septriani, S., Satria, E., & Aziz, B. (2024). *Antropologi Ekologi*. CV. Gita Lentera.

Chapter in an edited book:

- Permana, A. (2022). *Merebut Ruang Di Perkotaan Suatu Studi Antropologi Tentang Bentor= Occupying Urban Space: An Anthropological Study as Modes of Transportation in Gorontalo City*. Universitas Hasanuddin.
- Tambak, D. S. P. (2026). *Analisis Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Tebing Tinggi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Tinjauan Terhadap Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Pada Kelurahan Bandar Utama, Kota Tebing Tinggi)*. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.